

ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)

Benrindang Latusura, Dul Muid ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance on intellectual capital disclosure. The variables used in this study are board size, proportion of independent commissioners, blockholder ownership, and government ownership as independent variables and disclosure of intellectual capital as the dependent variable. This study also uses three control variables, namely SIZE, ROA, and LEV.

This study uses a sample of banking companies in 2017-2019 with a total sample of 132 samples. Sampling was based on a purposive sampling method that followed certain criteria. Multiple linear regression analysis is the analytical method used in this study.

The results of this study indicate that board size and government ownership have a negative and insignificant effect on intellectual capital disclosure. But found that the proportion of independent commissioners had a positive and significant effect on intellectual capital disclosure.

Keywords: intellectual capital disclosure, corporate governance, board size, proportion of independent commissioners, blockholder ownership, government ownership, SIZE, LEV, ROA

PENDAHULUAN

Modal intelektual adalah salah satu aset tak berwujud yang menarik perhatian para ahli karena dapat menjadi alat untuk menentukan nilai suatu perusahaan (Purnomosidhi, 2006). Penciptaan dan penggunaan aset tidak berwujud seperti modal intelektual dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang terdaftar di bursa efek karena menurut Guthrie & Petty (2000) efisiensi pasar modal dapat ditingkatkan melalui aset tak berwujud.

Namun, laporan keuangan belum memiliki kerangka kerja untuk pengungkapan modal intelektual. Untuk menangani keterbatasan ini, informasi mengenai aset tidak berwujud dilaporkan melalui pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure* oleh perusahaan agar kebutuhan informasi *stakeholder* dapat terpenuhi dengan lebih baik (Petty & Cuganesan, 2005). Maka dari itu, banyak manajer mulai melengkapi laporan keuangan perusahaan dengan informasi yang bersifat naratif, non-finansial untuk memenuhi permintaan pasar mengenai informasi yang lebih dapat diandalkan (Abeysekera, 2010); (Haji & Ghazali, 2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Elshandidy & Neri (2015) membuktikan bahwa fungsi pengawasan dari sistem tata kelola perusahaan mempengaruhi tingkat dan kualitas pengungkapan sukarela secara signifikan. Tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* merupakan seperangkat sistem yang didesain untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik demi memenuhi kepentingan para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Freeman (2010) mendefinisikan *Stakeholder* sebagai seluruh kelompok atau orang yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. *Corporate Governance* yang diterapkan dapat bervariasi antar satu negara dengan yang lain. Penerapan *Corporate Governance* yang bervariasi tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem hukum perlindungan investor tiap negara La Porta et al., (2000). Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun

¹ Corresponding author

2007 tentang Perseroan Terbatas, Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap perlindungan *investor* menganut sistem *two-tier board* dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*. Sistem *two-tier board* ditandai dengan adanya pembagian dewan direksi sebagai penanggung jawab serta pengelola perusahaan dan dewan komisaris yang memiliki fungsi pengawasan.

Sehubungan dengan pengungkapan sukarela, Kothari (2000) meyakini bahwa sifat dan kualitas mekanisme tata kelola perusahaan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh Donnelly & Mulcahy (2008) yang percaya bahwa sistem tata kelola perusahaan dapat meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan jika dilakukan secara efektif, melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Kothari (2000) juga meyakini bahwa pengembangan dan pengelolaan modal intelektual perusahaan dipengaruhi oleh sistem tata kelola perusahaan secara positif.

Peneliti ingin menelusuri peran dari sistem tata kelola perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual di perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak peraturan mengenai aset tak berwujud dimuat di dalam PSAK No.19 Tahun 2009, potensi modal intelektual di Indonesia semakin berkembang. PSAK No.19 Tahun 2009 menyatakan bahwa aset tak berwujud adalah aset non-finansial yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau tujuan administratif. Kemudian, peraturan lain yang menyatakan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan yang memuat salah satunya tentang tata kelola perusahaan muncul di dalam Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-431/BL/2012.

Hal menarik yang membuat peneliti ingin meneliti tentang masalah ini adalah standar yang menetapkan aset tak berwujud yang harus dilaporkan baik melalui pengungkapan wajib ataupun pengungkapan sukarela belum ada di Indonesia. Widyaningrum (2004) mengungkapkan bahwa di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pengukuran dan pelaporan modal intelektual. Mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi modal intelektual seperti karakteristik dewan komisaris dan struktur kepemilikan berkontribusi saat menilai efektivitas dan kesempatan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karakteristik dewan komisaris dapat dinilai melalui berbagai ukuran, contohnya oleh ukuran dewan dan proporsi komisaris independen. Sementara kepemilikan *blockholder* dan kepemilikan pemerintah dapat digunakan untuk menilai struktur kepemilikan.

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian Alfraih (2018) tentang Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Pengungkapan Modal Intelektual. Dalam penelitiannya, Alfraih (2018) menggunakan beberapa variabel independen seperti ukuran dewan, proporsi komisaris independen, *CEO duality*, kepemilikan *blockholder*, dan kepemilikan pemerintah. Sampel yang digunakan Alfraih yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Kuwait.

Keterbatasan pemahaman tentang pengaruh sistem tata kelola perusahaan terhadap modal intelektual (Appuhami & Bhuyan, 2015) menjadi *research gap* penelitian ini. Keterbatasan pemahaman tersebut tercermin dari adanya inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian dimulai dengan tinjauan literatur mengenai tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela. Kemudian diikuti dengan pengembangan teori agensi yang nantinya menjadi dasar dalam pembuatan kerangka penelitian. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja yang dipublikasikan oleh IFAC (*International Federation of Accountant*). Kerangka kerja ini telah berhasil digunakan dalam beberapa studi mengenai modal intelektual. Kerangka kerja yang dipublikasikan oleh IFAC memiliki 3 kategori yaitu : modal internal, modal eksternal, dan modal manusia serta 24 komponen. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini menguji pengaruh sistem tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan teori agensi untuk menjelaskan hubungan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual. Teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976) adalah teori yang membahas mengenai hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai agen. Teori ini juga membahas mengenai adanya perbedaan kepentingan antara

pemegang saham dan manajer, dimana pemegang saham cenderung lebih berfokus pada keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang seperti melalui peningkatan modal intelektual. Di sisi lain, manajer cenderung lebih berfokus pada kegiatan yang memberikan pendapatan yang besar dalam jangka pendek demi mendapatkan penilaian kinerja yang baik di mata pemegang saham, sehingga manajer mendapatkan insentif.

Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan masalah keagenan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah keagenan ini menurut Healy & Palepu (2001) adalah dengan menggunakan peran dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajer dalam menjalankan perusahaan, yang mana merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

Pengungkapan sukarela dapat dijelaskan menggunakan teori agensi melalui insentif manajemen. Watson et al., (2002) berpendapat manajer ingin membuktikan kepada pemegang saham bahwa mereka telah bertindak secara optimal dalam mengelola perusahaan karena mengetahui pemegang saham berusaha untuk mengendalikan perilaku manajer, sehingga meningkatkan pengungkapan dalam tujuan untuk mendapatkan insentif.

Pengaruh Ukuran Dewan Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Jumlah dewan komisaris dapat mempengaruhi bagaimana direktur perusahaan menjalankan tanggung jawab mereka (Fama & Jensen, 1983). Dari perspektif teori agensi, dapat dikatakan bahwa ukuran dewan yang lebih besar berpotensi lebih tinggi untuk mendeteksi masalah keagenan karena dewan tersebut menawarkan keahlian yang lebih besar, pengawasan manajemen dan akses ke sumber daya yang lebih luas. Selain itu, jumlah direktur yang lebih besar mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi karena ada lebih banyak orang untuk melaksanakan pekerjaan (Fauzi & Locke, 2012). Mahoney & Wang (2009) berpendapat bahwa menambahkan lebih banyak anggota ke dewan memberikan informasi dan sumber daya yang berpotensi memiliki manfaat. Jadi, dewan yang lebih besar secara langsung meningkatkan daya saing perusahaan dan meningkatkan lingkungan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama yang diajukan sebagai berikut:

H1: Ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Fama & Jensen (1983) menyatakan bahwa komposisi dewan independen merupakan mekanisme penting dalam konflik agensi internal yang menyebar. Representasi eksternal yang lebih besar sering dianjurkan, karena orang-orang ini cenderung lebih objektif dalam memantau tindakan manajemen (Sundaramurthy et al., 1997). Li (1994) berpendapat bahwa pengendalian keputusan adalah fungsi utama dewan, dan proporsi komisaris independen memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung kepentingan pemegang saham dan memantau perilaku manajemen. Fama & Jensen (1983) berhipotesis bahwa proporsi komisaris independen memiliki dorongan untuk mengembangkan reputasi sebagai ahli dalam pengendalian keputusan. Menurut hipotesis ini, proporsi komisaris independen yang waspada dan membangun reputasi yang baik dihargai dengan kursi tambahan di dewan, sementara rekan-rekan mereka yang kurang efektif telah kehilangan jabatan mereka (Fich & Shivdasani, 2007).

Dalam sebuah pemeriksaan reaksi saham terhadap pemilihan direktur eksternal di Amerika Serikat, Rosenstein & Wyatt (1990) mengamati reaksi saham yang positif dan signifikan setelah pengumuman anggota dewan eksternal yang baru, menunjukkan bahwa para pemegang saham bereaksi positif terhadap penunjukan semacam itu. Sundaramurthy et al. (1997) mencatat bahwa penunjukan direktur eksternal dapat berfungsi sebagai sinyal ke pasar bahwa kapasitas pemantauan dewan sedang diperkuat. Proporsi komisaris independen yang memiliki reputasi baik memiliki dorongan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengungkapan perusahaan (Huafang & Jianguo, 2007). Cerbioni & Parbonetti (2007) berpendapat bahwa model tata kelola perusahaan yang baik dicirikan oleh, antara lain, dewan yang terdiri dari mayoritas direktur eksternal yang memainkan peran aktif dalam pemantauan, hal itu penting dalam meningkatkan kualitas keseluruhan pengungkapan perusahaan secara sukarela. Akhirnya, Jing Li et al. (2008) berpendapat bahwa keahlian yang lebih luas dan pengalaman dari direksi non-eksekutif akan mendorong manajemen untuk mengambil posisi pengungkapan di luar suatu kepatuhan yang bersifat ritualistik, tidak kritis terhadap norma yang ditentukan, ke posisi yang lebih proaktif yang mencerminkan relevansi dari

nilai modal intelektual kepada pemangku kepentingan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua yang diajukan sebagai berikut:

H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Pengaruh Kepemilikan *Blockholder* Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), berdasarkan teori agensi dan struktur kepemilikan, memainkan peran sentral dalam literatur corporate governance. Bonazzi & Islam (2007) berpendapat bahwa mekanisme kontrol yang efektif yang dapat mengurangi biaya agensi dan memaksa manajer bertindak demi kepentingan pemegang saham telah menjadi perhatian utama bagi tata kelola perusahaan. Demikian pula, Fama & Jensen (1983) berpendapat bahwa struktur kepemilikan merupakan elemen penting dalam pengendalian dan tata kelola perusahaan. Teori keuangan telah lama mengakui peran penting dari ukuran pemegang saham dalam tata kelola perusahaan (Dhillon & Rossetto, 2009).

Sumber daya dan keahlian mereka memiliki artian bahwa pemilik blok saham yang besar memiliki dorongan lebih besar untuk memantau dan mendisiplinkan manajer untuk mengatasi masalah kebebasan dalam bertindak yang dihasilkan dari kepemilikan yang tersebar (La Porta et al., 2000). Dengan demikian, *blockholder* dapat membantu meningkatkan kualitas pelaporan dan transparansi. White et al., (2007) berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan yang rendah dapat disamakan dengan pengendalian manajerial, sedangkan yang sebaliknya dapat disamakan dengan pengendalian pemilik. Atau, Jing Li et al., (2008) berpendapat bahwa *blockholder* memberikan pemantauan yang efektif dan mengurangi asimetri informasi, karena mereka biasanya dapat mengakses informasi perusahaan yang mereka butuhkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan sebagai berikut:

H3: Kepemilikan *blockholder* berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

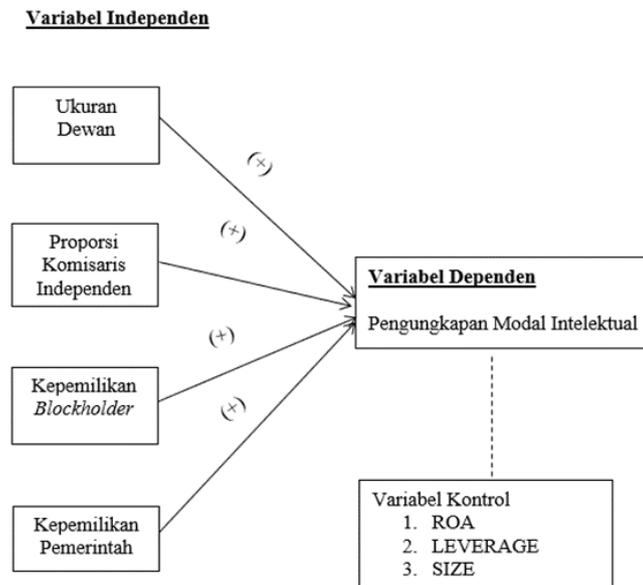
Eng & Mak (2003) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah adalah kondisi dimana pemerintah memiliki kepemilikan saham pada perusahaan. Kepemilikan saham oleh pemerintah dapat membantu menyatukan kepentingan manajer dan pemegang saham. Ini karena pemerintah seharusnya sudah memiliki mekanisme dan aturan yang jelas untuk menjalankan tugasnya, sehingga pemerintah menjadi pengawas kinerja manajemen yang efektif dan efisien.

Frirer & Williams (2005) mengklaim bahwa dengan adanya kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah direktur perusahaan akan lebih fokus terhadap kesejahteraan perusahaan melalui pengembangan sumber daya manusia dan modal intelektual yang bermanfaat secara menyeluruh. Manajemen perusahaan cenderung lebih transparan jika ada tekanan dari pemerintah yang besar. Selaras dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai media untuk pelaporan tanggung jawab manajemen. Sebagai bentuk tanggung jawab manajemen perusahaan, maka perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih luas dan jelas tentang sumber daya perusahaan, termasuk modal intelektual yang berkaitan erat dengan penciptaan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis keempat yang diajukan sebagai berikut:

H4: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Kerangka pemikiran antara hubungan ukuran dewan, proporsi komisaris independen, kepemilikan *blockholder*, dan kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan modal intelektual adalah sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran



Sumber: (Alfraih, 2018), (Abeysekera, 2010), (Appuhami & Bhuyan, 2015)

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yang berbeda dan akan digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Variabel tersebut diantaranya adalah variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan modal intelektual (*ICD*). Whiting & Miller (2008) melihat kembali studi tentang pengungkapan modal intelektual dan determinannya, dan melaporkan bahwa analisis isi dari konten hampir selalu digunakan untuk mengukur tingkatannya. Pendekatan ini melibatkan pengkodean informasi kualitatif dan kuantitatif ke dalam kategori yang telah ditentukan untuk mendapatkan pola dalam penyajian dan pelaporan informasi (Guthrie et al., 2004). Teknik ini biasanya mengharuskan manusia untuk mengemas elemen pengungkapan modal intelektual yang ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan (Lee & Guthrie, 2010), konsisten dengan argumen (Abeysekera, 2010) bahwa teknik ini adalah sumber utama informasi tentang kegiatan modal intelektual perusahaan. Mengikuti kerja literatur empiris sebelumnya (Abeysekera, 2010; Alcaniz et al., 2015; Bozzolan et al., 2006; Brügggen et al., 2009; Huafang & Jianguo, 2007), penelitian ini menggunakan pendekatan yang sama.

Teknik ini dapat diterapkan dalam beberapa cara. Cara-cara tersebut termasuk menghitung kata kunci, kalimat atau bagian, atau membaca seluruh teks (Gamerschlag, 2013). Namun, Jing Li et al., (2008) berpendapat bahwa meskipun kata kunci adalah unit pengukuran terkecil, kata kunci tersebut memberikan hal yang paling masuk akal. Demikian pula, Gamerschlag, (2013) berpendapat bahwa mengidentifikasi kata kunci yang spesifik pada modal intelektual adalah bentuk analisis konten yang paling dapat diandalkan, karena selalu menghasilkan skor yang sama dan dapat dengan mudah ditiru oleh peneliti lain. Setelah pekerjaan sebelumnya Gamerschlag (2013), ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah munculnya kata kunci yang ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI. Kata kunci didefinisikan menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Sveiby (1997) dan dimodifikasi oleh J Guthrie et al., (2004), yang telah digunakan dengan sukses dalam beberapa studi modal intelektual Branco et al., (2005); Whiting & Miller, (2008). Kerangka kerja ini memiliki tiga kategori dan 24 komponen. Tiga kategori modal intelektual adalah:

Modal Internal	Modal Eksternal	Modal Manusia
Hak Kekayaan Intelektual	Merk	Pendidikan
Budaya Perusahaan	Pelanggan	Keterampilan
Paten/Hak Cipta/ <i>Merk</i> Dagang	Nama Perusahaan	Kompetensi/Pengetahuan relasi kerja
Sistem Informasi	Kepuasan Pelanggan	Kualifikasi Akademik
Sistem Jaringan	Loyalitas Pelanggan	Kualifikasi Profesional
Proses Manajemen	Jaringan Distribusi	Modal Manusia/Sumber Daya
Filosofi Manajemen	Kolaborasi Bisnis	Semangat Kewirausahaan, Kemampuan Berinovasi, Proaktif dan Reaktif, Kemampuan untuk Berubah
Hubungan Finansial	Perjanjian Lisensi	Pelatihan SDM

Untuk mengukur tingkat pengungkapan modal intelektual, studi empiris sebelumnya (Abeysekera, 2010; James Guthrie & Petty, 2000; Haji & Ghazali, 2013; Jing Li et al., 2008) telah menggunakan pendekatan dikotomi (tidak diberi bobot). Dalam pendekatan ini, nilai "0" ditetapkan untuk non-disclosure dan nilai "1" diberikan jika item tersebut muncul. Cooke (1989) berpendapat bahwa pendekatan dikotomis lebih objektif daripada pendekatan tertimbang karena memberikan semua hal yang sama pentingnya. Demikian pula, Abeysekera, (2010) berpendapat bahwa menetapkan bobot untuk berbagai jenis pengungkapan modal intelektual dapat menyebabkan kesalahan karena scaling bias. Konsisten dengan pekerjaan sebelumnya, setiap item pengungkapan modal intelektual diberikan bobot yang sama dalam penelitian ini. Laporan tahunan perusahaan setiap perusahaan diperiksa oleh peneliti untuk mengidentifikasi kemunculan 24 kata kunci, dan skor dicatat pada lembar pengkodean. Total nilai pengungkapan dihitung untuk setiap perusahaan, dan indeks dibangun untuk mengukur tingkat pengungkapan relatifnya. Indeks ini adalah rasio dari skor pengungkapan yang sebenarnya dari perusahaan semaksimal mungkin (yaitu, 24).

Variabel Independen

Di dalam penelitian ini ada empat variabel independen, yaitu ukuran dewan (*BSIZE*), proporsi komisaris independen (*OUT*), kepemilikan *blockholder* (*BLOCK*), dan kepemilikan pemerintah (*GOV*). Masing-masing variabel akan dijelaskan pada tiap-tiap sub-bab di bawah ini.

Ukuran Dewan

Ukuran dewan mengukur jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan secara keseluruhan. Variabel ini menggunakan pengukuran yang umum untuk ukuran dewan direksi (Alfraih, 2018).

Proporsi Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen mengacu pada campuran direktur internal (eksekutif) dan eksternal (non-eksekutif). Variabel ini menggunakan pengukuran yang umum untuk proporsi komisaris independen. Persentase dari komisaris independen dibandingkan dengan total jumlah dewan komisaris digunakan untuk mengukur proporsi komisaris independen (Alfraih, 2018).

Kepemilikan *Blockholder*

Kepemilikan *blockholder* merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh *blockholder* setidaknya 5% dari jumlah saham yang beredar. Penelitian ini menggunakan pengukuran yang umum untuk kepemilikan *blockholder*. Proporsi dari saham biasa yang dimiliki blokir paling sedikit 5% dari jumlah saham yang diterbitkan digunakan untuk mengukur kepemilikan *blockholder* (Alfraih, 2018).

Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah sebagai proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pemerintah dan institusi terkait pemerintah (Eng dan Mak, 2003). Proporsi dari saham biasa yang dimiliki pemerintah paling sedikit 5% dari jumlah saham yang diterbitkan (Alfraih, 2018)

Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang mampu melakukan suatu pengontrolan terhadap variabel-variabel independen yang nantinya akan menjelaskan keberadaan daripada variabel dependen. Beberapa bahasan variabel kontrol yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan dalam melakukan identifikasi atas perusahaan terkait besar kecilnya suatu perusahaan untuk mengurangi dampak atas penyimpangan atas ukuran yang ekstrim (Wang & Sarkis, 2017). Pengukuran atas ukuran perusahaan dilakukan dengan menggunakan logaritma natural dari total aset suatu perusahaan. Kedua, *leverage* yaitu menilai atas total hutang dibagi total aset. Variabel kontrol yang ketiga adalah ROA yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset perusahaan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan perbankan di Indonesia. Perusahaan perbankan dipilih menjadi fokus dari penelitian ini karena berperan banyak dalam pengelolaan perekonomian serta sangat identik dengan perhatian dalam investasi yang dilakukan investor. Dipilihnya sektor perbankan juga karena penilaian kinerja modal intelektual sangat diperlukan dalam perusahaan perbankan dimana perusahaan dituntut untuk selalu berinovasi dan memiliki strategi bagi pengembangan bisnis sektor perbankan, sehingga penting untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi.

Teknik purposive sampling dipilih sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu mengambil sampel berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria dalam menentukan sampel penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut untuk periode 2017-2019;
2. Perusahaan perbankan yang telah menerbitkan laporan tahunan yang telah diaudit pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019;
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah karena mata uang berfluktuasi sehingga penelitian menjadi tidak akurat;
4. Memberikan data yang peneliti butuhkan untuk mengukur variabel dependen, independen, dan kontrol yang ditetapkan pada penelitian ini.

Metode Analisis

Model regresi pada penelitian ini menyesuaikan dengan variabel independen, variabel dependen, maupun variabel kontrol yang digunakan untuk menguji hipotesis 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagai berikut:

$$ICD = \beta_0 + \beta_1 SIZE + \beta_2 OUT + \beta_3 BLOCK + \beta_4 GOV + \beta_5 SIZE + \beta_6 LEV + \beta_7 ROA + \epsilon_i$$

Keterangan:

<i>ICD</i>	: Pengungkapan modal intelektual
β	: Koefisien regresi
<i>SIZE</i>	: Ukuran dewan
<i>OUT</i>	: Proporsi komisaris independen
<i>BLOCK</i>	: Kepemilikan <i>blockholder</i>
<i>GOV</i>	: Kepemilikan pemerintah
<i>SIZE</i>	: Ukuran Perusahaan
<i>LEV</i>	: <i>Leverage</i>
<i>ROA</i>	: <i>Return on Asset</i>
ϵ	: Nilai residual (<i>error</i>)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi sampel penelitian

Berdasarkan metode *purposive sampling* yang dilakukan, ditemukan 47 perusahaan perbankan sebagai sampel pada penelitian ini dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2019	47
2.	Perusahaan perbankan yang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian	(3)
	Total	44
	Jumlah tahun penelitian	3
	Jumlah sampel perusahaan	132
	<i>Outlier</i>	0
	Total	132

Sumber: Data sekunder, diolah 2021

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan memberikan informasi terkait gambaran deskripsi sampel atau populasi serta melihat data dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Berikut hasil daripada uji analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Statistik Dekskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ICD	132	.5000	1.0000	.8210	.1097
BSIZE	132	2.0000	13.0000	4.7727	2.2227
OUT	132	.0000	1.0000	.5635	.1528
BLOCK	132	.3971	1.0000	.7425	.1729
GOV	132	.0000	.6000	.0794	.1946
SIZE	132	27.2226	34.8871	31.0920	1.8235
ROA	132	-.1228	.1021	.0065	.0249
LEV	132	.0008	.9682	.7816	.1833

Sumber: Data sekunder, diolah 2021

Pengungkapan modal intelektual (*ICD*) yang diukur dengan menggunakan 24 item pengungkapan dalam laporan keuangan pada tahun terakhir oleh perusahaan menunjukkan rata-rata sebesar 0,8210. Hal ini berarti bahwa rata-rata pengungkapan modal intelektual perusahaan sampel pada tahun terakhir adalah sebesar 82,10%, Nilai pengungkapan modal intelektual terkecil adalah sebesar 0,5000 dan nilai pengungkapan modal intelektual capital tertinggi adalah 1,000.

Variabel ukuran dewan komisaris (*BSIZE*) dari perusahaan sampel rata-rata diperoleh sebesar 4,7727 orang. Hal ini berarti bahwa sebagian besar perusahaan memiliki anggota dewan komisaris adalah sebanyak 4 - 5 orang, dengan ukuran dewan yang paling kecil sebanyak 2 dan ukuran dewan yang paling banyak adalah 13 orang.

Proporsi dewan komisaris independen (*OUT*) secara rata-rata diperoleh sebesar 0,5635. Hal ini berarti bahwa 56,35% anggota komisaris perusahaan sampel adalah komisaris independen atau diambil dari luar perusahaan. Proporsi Komisaris independen terendah adalah 0,00 dan komitsaris independen terbesar adalah 1,000 atau 100%.

Variabel kepemilikan *blockholder* yang diukur dengan konsentrasi kepemilikan saham terbesar atau *blockholder* (*BLOCK*) menunjukkan rata-rata sebesar 0,7425 atau 74,25%. Hal ini berarti bahwa sebanyak 74,25% bank sampel memiliki kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada satu pihak. Kepemilikan *blockholder* terendah adalah sebesar 39,71% dan kepemilikan *blockholder* tertinggi mencapai 100,00%.

Variabel konsentrasi kepemilikan saham oleh pemerintah (*GOV*) menunjukkan rata-rata sebesar 0,0794 atau 7,94%. Hal ini berarti bahwa sebanyak 7,04% bank sampel memiliki kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah. Kepemilikan saham pemerintah terendah adalah sebesar 0,00 atau 0,00% dan kepemilikan saham pemerintah tertinggi mencapai 0,60 atau 60,00%.

Hasil penelitian dari ukuran perusahaan sampel penelitian ini diperoleh rata-rata variabel *SIZE* sebesar 31,0920. Hal ini berarti bahwa perusahaan sampel secara rata-rata diperoleh sebesar 31,0920. Nilai *SIZE* terkecil adalah sebesar 27,2226, sedangkan nilai *SIZE* terbesar adalah sebesar 34,8871.

Variabel profitabilitas *ROA* diukur dengan rasio laba bersih terhadap total aset sebagai variabel kontrol menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,0065. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki laba sebesar 0,65% dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Nilai terkecil dari *ROA* diperoleh sebesar -0,1228 atau terjadi kerugian, sedangkan *ROA* terbesar adalah sebesar 0,1021 atau 10,21%.

Variabel leverage yang diukur dengan Debt to asset ratio menunjukkan rata-rata sebesar 0,7816. Hal ini berarti bahwa perusahaan sampel rata-rata mampu memiliki hutang sebesar 78,16% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai rata-rata Leverage yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan dari modal sendiri. Leverage terendah adalah 0,0008 dan leverage tertinggi adalah sebesar 0,9682.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil yang diperoleh selanjutnya akan diuji kemaknaan model tersebut secara simultan dan secara parsial. Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai F sebesar 22,769 dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan pada penelitian ini bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Sisi lain, Nilai Adjusted R Square menunjukkan angka sebesar 0,538. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan, proporsi komisaris independen, kepemilikan *blockholder*, dan kepemilikan pemerintah dengan variabel kontrol *SIZE*, *LEV*, *ROA* dapat menjelaskan sebesar 53,8% dari variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual. Sisanya yaitu 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Berikut adalah hasil daripada uji statistik t pada model regresi penelitian ini yang ditunjukkan pada **tabel 3**:

Tabel 3
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.918	.208		-4.422	.000
BSIZE	-.002	.005	-.035	-.335	.738
OUT	.097	.045	.135	2.161	.033
BLOCK	.100	.043	.158	2.317	.022
GOV	-.051	.044	-.090	-1.144	.255
SIZE	.052	.007	.873	7.820	.000
ROA	-.370	.295	-.084	-1.255	.212
LEV	-.010	.037	-.017	-.274	.785

Sumber: Data sekunder, diolah 2021

Pengaruh Ukuran Dewan Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Nilai koefisien beta dari (H1) berdasarkan **Tabel 3** menunjukkan angka yang negatif dan nilai signifikansi sebesar 0,738 atau lebih besar daripada (>0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut **ditolak**. Hal ini berarti jumlah ukuran dewan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Hasil ini inkonsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfrian (2018), Abeysekera (2010), Rodrigues et al., (2016), Haji & Ghazali (2013) namun sejalan dengan penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007), Hidalgo et al (2011). Fama & Jensen berpendapat bahwa ukuran dewan yang lebih besar kurang efektif karena koordinasinya yang lebih kompleks ketika memiliki lebih banyak direktur. Lebih lanjut, Hidalgo et al. menemukan bahwa jumlah dewan yang melebihi 15 orang dapat memiliki pengaruh yang negatif karena kapasitas untuk pengawasan dan control dalam proses pengambilan keputusan menurun.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Nilai koefisien beta dari (H2) pada **Tabel 3** menunjukkan angka yang positif dan nilai signifikansi sebesar 0,033 atau lebih kecil daripada ($<0,05$), sehingga dapat disimpulkan hipotesis tersebut **diterima**. Dapat ditarik kesimpulan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Proporsi komisaris independen merupakan mekanisme yang penting dalam konflik agensi internal. Komisaris independen yang lebih besar sering dianjurkan, karena orang-orang ini cenderung lebih objektif dalam memantau tindakan manajemen. Kontrol yang lebih objektif dalam pelaksanaan tindakan manajemen ini akan mendorong keterbukaan informasi perusahaan yang lebih objektif dan luas sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi di perusahaan.

Keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena di dalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik serta stakeholder lainnya. Hal ini menunjukkan manajemen perusahaan dengan diawasi komisaris independen mampu mengungkapkan informasi yang penting dalam laporan perusahaan secara sukarela seperti yang diharapkan para stakeholder. Semakin banyak komisaris independen akan semakin transparan dalam mengelola perusahaan, karena manajer akan selalu diawasi dalam menyusun laporan perusahaan. Hasil ini sudah sejalan dengan penelitian Alfraih (2018), Cerbioni & Parbonetti (2007), dan Haji & Ghazali (2013).

Pengaruh Kepemilikan *Blockholder* Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Nilai koefisien beta dari (H3) berdasarkan **Tabel 3** menunjukkan angka yang positif dan nilai signifikansi sebesar 0,022 atau lebih kecil daripada ($<0,05$) sehingga hipotesis ketiga **diterima**. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan *blockholder* dan pengungkapan modal intelektual.

Dari perspektif teori agensi, mekanisme kontrol yang efektif dapat mengurangi biaya agensi dan memaksa manajer bertindak demi kepentingan pemegang saham. Sumber daya dan keahlian mereka memiliki artian bahwa pemilik blok saham yang besar memiliki dorongan lebih besar untuk memantau dan mendisiplinkan manajer untuk mengatasi masalah kebebasan dalam bertindak yang dihasilkan dari kepemilikan yang tersebar. Pemegang saham *blockholder* memainkan peran penting dalam tata kelola, karena ukuran saham mereka di perusahaan memberikan dorongan untuk menanggung biaya manajer pemantauan. Hasil ini sudah sejalan dengan penelitian Alfraih (2018) dan Gan et al., (2013).

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Nilai koefisien beta dari (H4) pada **Tabel 3** menunjukkan angka yang negatif dan tingkat signifikansi sebesar 0,255 atau lebih besar daripada ($>0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut **ditolak**. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Dari perspektif teori agensi, pemerintah cenderung melihat praktik tata kelola perusahaan yang baik dan pengungkapan sebagai tindakan yang melindungi pemegang saham dan mengurangi asimetri informasi. Dengan tingginya kepemilikan pemerintah, maka tingkat pengungkapan modal intelektual akan lebih luas terutama di bidang sumber daya manusia karena pemerintah cenderung lebih fokus pada pengembangan SDM masyarakatnya.

Hasil ini menunjukkan inkonsistensi dengan penelitian Firer & Williams, namun sejalan dengan penelitian Alfraih (2018) dan Firth et al (2008). Eng & Mak berpendapat bahwa kepemilikan pemerintah dapat meningkatkan moral hazard serta masalah agensi. Mak & Li (2001) berpendapat bahwa pemerintah cenderung kurang aktif dalam melakukan pengawasan di perusahaan-perusahaan

yang terdaftar. Huafang & Jianguo (2007) berpendapat bahwa akuntabilitas dan pemantauan yang buruk cenderung akan melemahkan tekanan untuk melakukan pengungkapan sukarela.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian terkait dengan analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual suatu perusahaan. Perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 merupakan sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan total sampel sebesar 132. Selain itu, kriteria lain yang diperhitungkan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangannya dengan mata uang rupiah, dengan alasan bahwa nilai mata uang yang selalu berfluktuasi.

Dari keempat variabel independen, setelah dilakukan analisis terdapat hasil sebagai berikut. Pertama, Hasil pengujian menunjukkan variabel ukuran dewan komisaris (*BFSIZE*) memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual (*ICD*). Ini berarti bahwa jumlah anggota dewan komisaris di dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual yang dilakukan perusahaan. Kedua, Hasil pengujian menunjukkan variabel proporsi dewan komisaris independen (*OUT*) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual (*ICD*). Hal ini berarti bahwa semakin banyak dewan komisaris independen di dalam perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan modal intelektual perusahaan. Ketiga, Hasil menunjukkan variabel *blockholder* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual (*ICD*). Ini berarti bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham suatu *blockholder*, maka akan semakin tinggi juga pengungkapan modal intelektual suatu perusahaan. Keempat, Hasil pengujian menunjukkan variabel kepemilikan saham pemerintah (*GOV*) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual (*ICD*). Sehingga, besar kecilnya kepemilikan saham milik pemerintah atau instansi terkait lainnya tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan modal intelektual suatu perusahaan.

Adapun beberapa keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini diantaranya adalah pengukuran koefisien determinasi R^2 hanya memperoleh nilai sebesar 0,538 atau 53,8%. Ini berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen masih terbatas dan belum ideal. Selain itu, dari hasil uji hipotesis terdapat dua hipotesis yang tidak diterima yaitu yang terkait dengan ukuran dewan dan kepemilikan pemerintah;

Evaluasi keterbatasan dari penelitian ini memberikan rekomendasi ataupun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu memperpanjang jangka waktu penelitian sampai dengan 5 tahun dan menambah sektor perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperoleh sampel yang lebih luas lagi serta menggambarkan seluruh keadaan perusahaan yang *go public* di Indonesia. Kemudian dapat meneliti kembali variabel-variabel independen yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual karena mengingat terdapat hasil inkonsistensi dari penelitian ini dengan beberapa penelitian lainnya.

REFERENSI

- Abeyssekera, I. (2010). The influence of board size on intellectual capital disclosure by Kenyan listed firms. *Journal of Intellectual Capital*.
- Alcaniz, L., Fernando Gomez-Bezares, & Jose Vicente Ugarte. (2015). *Firm characteristics and intellectual capital disclosure in IPO prospectuses*.
- Alfraih, M. M. (2018). The role of corporate governance in intellectual capital disclosure. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Appuhami, R., & Bhuyan, M. (2015). Examining the influence of corporate governance on intellectual capital efficiency: Evidence from top service firms in Australia. *Managerial Auditing Journal*.
- Bonazzi, L., & Islam, S. M. N. (2007). *Agency theory and corporate governance A study of the effectiveness of board in their monitoring of the CEO*. 2(1), 7–23.
<https://doi.org/10.1108/17465660710733022>
- Branco, M. C., Delgado, C., Sousa, C., & Sa, M. (2005). *An analysis of intellectual capital disclosure by Portuguese companies*. *IC*. <https://doi.org/10.1108/14502191011080809>
- Brüggen, A., Philip Vergauwen, & Mai Dao. (2009). *Determinants of intellectual capital disclosure : evidence from*. 47(2), 233–245. <https://doi.org/10.1108/00251740910938894>
- Cerbioni, F., & Parbonetti, A. (2007). *Exploring the Effects of Corporate Governance on Intellectual Capital Disclosure : An Analysis of European Biotechnology Companies* (Issue November 2014). <https://doi.org/10.1080/09638180701707011>
- Cooke, T. E. (1989). *Voluntary Corporate Disclosure by Swedish Companies*.
- Dhillon, A., & Rossetto, S. (2009). *Corporate control and multiple large shareholders*.
- Donnelly, R., & Mulcahy, M. (2008). Board structure, ownership, and voluntary disclosure in Ireland. *Corporate Governance: An International Review*, 16(5), 416–429.
- Elshandidy, T., & Neri, L. (2015). Corporate governance, risk disclosure practices, and market liquidity: Comparative evidence from the UK and Italy. *Corporate Governance: An International Review*, 23(4), 331–356.
- Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22(4), 325–345.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. In *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership* (Vol. 26, Issue 2, pp. 163–188).
<https://doi.org/10.1086/467037>
- Fauzi, F., & Locke, S. (2012). *Board Structure, Ownership Structure and Firm Performance: A Study of New Zealand Listed-firms*.
- Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2007). *Financial fraud , director reputation , and shareholder wealth*. 86, 306–336. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.05.012>
- Firer, S., & Williams, S. M. (2005). Firm ownership structure and intellectual capital disclosures. *South African Journal of Accounting Research*, 19(1), 1–18.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Gamerschlag, R. (2013). *Value relevance of human capital information*.
<https://doi.org/10.1108/14691931311323913>
- Gan, K., Mara, U. T., & Mara, U. T. (2013). *Intellectual capital disclosure in the context of corporate governance Zakiah Saleh Masoud Abessi Ching Choo Huang*. 10(1), 52–70.
- Guthrie, J, Petty, R., & Yongvanich, K. (2004). *Using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting*. 5(2), 282–293.
<https://doi.org/10.1108/14691930410533704>
- Guthrie, James, & Petty, R. (2000). Intellectual capital: Australian annual reporting practices. *Journal of Intellectual Capital*.
- Haji, A. A., & Ghazali, N. A. M. (2013). A longitudinal examination of intellectual capital disclosures and corporate governance attributes in Malaysia. *Asian Review of Accounting*.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1–3), 405–440.
- Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). *Ownership structure , board composition and corporate*

- voluntary disclosure Evidence from listed companies in China. 1961.
<https://doi.org/10.1108/02686900710759406>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- KEP-431/BL/2012. (2012). *KEP-431/BL/2012*.
- Kothari, S. P. (2000). The role of financial reporting in reducing financial risks in the market. *Conference Series-Federal Reserve Bank of Boston*, 44, 89–102.
- La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*, 58(1–2), 3–27.
[https://doi.org/10.1016/s0304-405x\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/s0304-405x(00)00065-9)
- Li, J. (1994). *Ownership Structure and Board Composition: A Multi-country Test of Agency Theory Predictions*. <https://doi.org/10.1002/mde.4090150409>
- Li, Jing, Pike, R., & Haniffa, R. (2008). Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms. *Accounting and Business Research*, 38(2), 137–159.
<https://doi.org/10.1080/00014788.2008.9663326>
- Mahoney, J. T., & Wang, H. C. (2009). *Firm capability , corporate governance and competitive behaviour : a multi-theoretic framework Jinyu He **. 1(4), 293–318.
- Mak, Y. T., & Li, Y. (2001). Determinants of corporate ownership and board structure: evidence from Singapore. *Journal of Corporate Finance*, 7(3), 235–256.
- Petty, R., & Cuganesan, S. (2005). Voluntary disclosure of intellectual capital by Hong Kong companies: examining size, industry and growth effects over time. *Australian Accounting Review*, 15(36), 40–50.
- PSAK No.19, (2009).
- Rodrigues, L. L., Romero, F. T., & Craig, R. (2016). Corporate governance and intellectual capital reporting in a period of financial crisis : Evidence from Portugal. *International Journal of Disclosure and Governance*, December. <https://doi.org/10.1057/jdg.2015.20>
- Rosenstein, S., & Wyatt, J. G. (1990). *Outside directors , board independence , and shareholder wealth ”*. 36, 175–191.
- Sundaramurthy, C., Mahoney, J. M., & Mahoney, J. T. (1997). *Board Structure, Antitakeover Provisions, and Stockholder Wealth*.
- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- Wang, Z., & Sarkis, J. (2017). Corporate social responsibility governance, outcomes, and financial performance. *Journal of Cleaner Production*, 162, 1607–1616.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.142>
- Watson, A., Shrivies, P., & Marston, C. (2002). Voluntary disclosure of accounting ratios in the UK. *The British Accounting Review*, 34(4), 289–313.
- White, G., Lee, A., & Tower, G. (2007). Drivers of voluntary intellectual capital disclosure in listed biotechnology companies. *Journal of Intellectual Capital*.
- Whiting, R. H., & Miller, J. C. (2008). Voluntary disclosure of intellectual capital in New Zealand annual reports and the “hidden value.” *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 12(1), 26–50. <https://doi.org/10.1108/14013380810872725>
- Widyaningrum, A. (2004). Modal Intelektual. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.21002/jaki.2004.02>